YLBHI

DISKUSI
RUU TATA CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Jalur Cepat atau Ruang Gelap?

Muhamad Isnur
Ketua Umum YLBHI

26 November 2026



Foto: Dokumentasi YLBHI

Kecepatan hanya gejala, akarnya ruang gelap

Dua Faktor: siapa memegang kunci percepatan, dan apa akibatnya bila prosedur dilanggar.

Lingkaran tertutup

Pemerintah dan mayoritas DPR mengunci keputusan sebelum publik sempat bersuara

Dokumen tak tersedia

PSHK mencatat 87,1% RUU yang dipantau pada 2025 tidak menyertakan draf dan naskah akademik

Masukan tanpa jejak

DPR mengundang dan mendengar warga, tetapi jarang menjawab masukannya

Tanpa konsekuensi

UU yang MK nyatakan cacat formil tetap berlaku

MK membuktikan: UU Polri melompati tahapan



Foto: Dokumentasi YLBHI

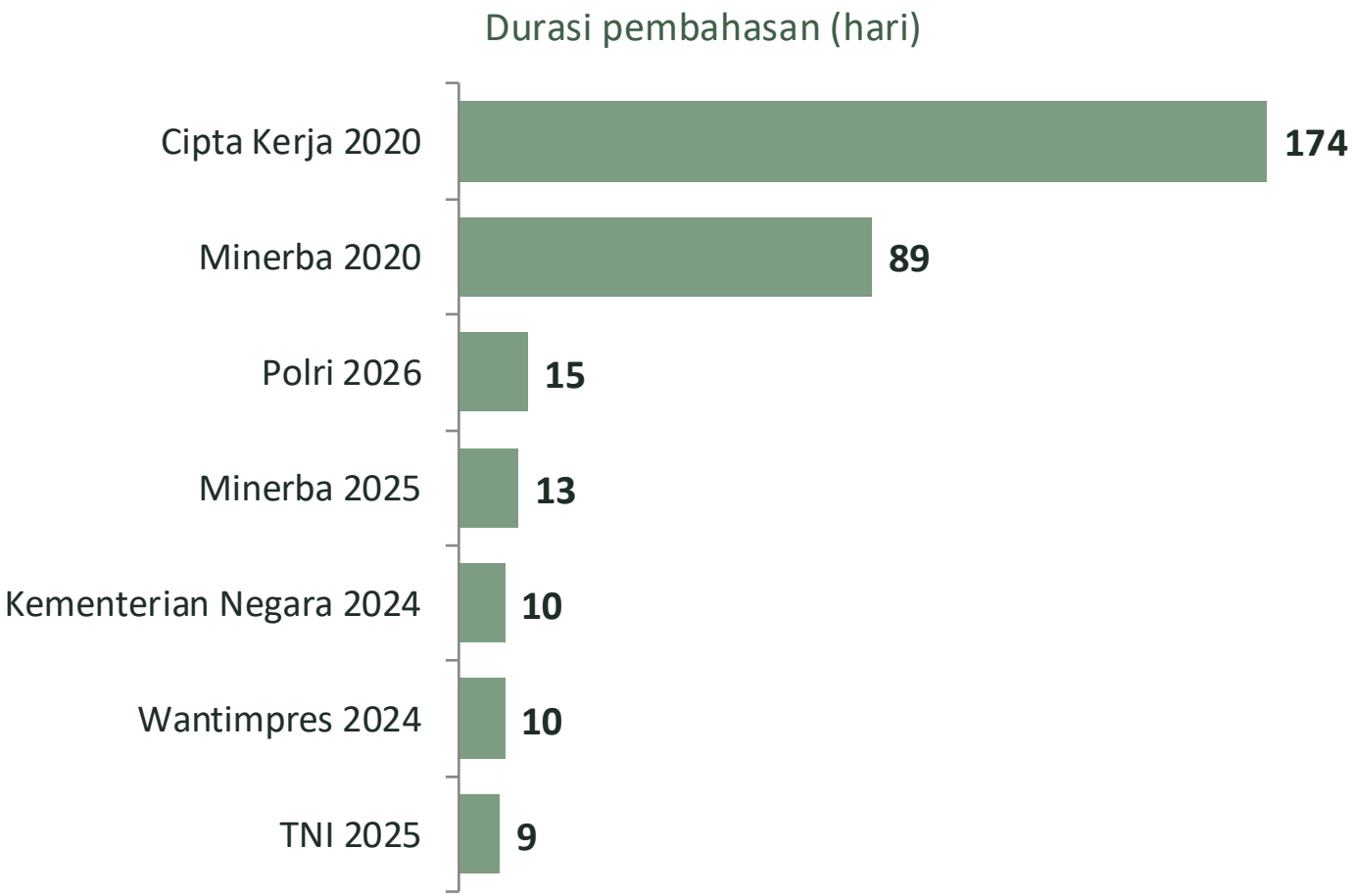
15 hari

Waktu pembahasan UU Polri 2026, dari Tingkat I hingga persetujuan bersama (PSHK)

Putusan MK 251/PUU-XXIV/2026 · 23 November 2026

- MK menyatakan UU Polri cacat formil dan memberi waktu perbaikan satu tahun
- DPR melewatkan perencanaan, penyusunan, dan harmonisasi di Baleg
- Rapat paripurna tidak dapat menggantikan tahapan dalam UU P3
- **Selama perbaikan berjalan, UU tetap berlaku**

DPR sudah melaju lebih cepat dari jalur cepat



Sumber: PSHK, Tingkat I sampai persetujuan bersama DPR-Presiden

1.676 DIM

DPR dan pemerintah menuntaskan DIM RUU KUHAP dalam 2 hari, 9-10 Juli 2025

1 masa sidang

batas jalur cepat dalam draf. Draf ini mengesahkan kebiasaan yang sudah berjalan.

Cepat untuk kekuasaan, lambat untuk warga rentan

Ditunda

22 tahun

RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga menunggu hingga disahkan April 2026

18 tahun

RUU Masyarakat Adat masih menunggu kepastian

Dikebut

12 hari

Revisi UU KPK 2019 (NA)

9 hari

UU TNI 2025, dibahas tertutup di hotel

7 hari

UU MK 2020 (NA)

DPR mengubah aturan main setelah dikoreksi MK



2021

Putusan 91

MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena partisipasinya tidak bermakna

Respons: DPR mengubah UU P3, pemerintah menerbitkan Perppu

2023

Putusan 54

MK meloloskan penetapan Perppu Cipta Kerja; 4 hakim berbeda pendapat

Standar partisipasi melemah

2025

Putusan 81

MK menolak uji formil UU TNI dari YLBHI; 4 hakim berbeda pendapat

Putusan ini melahirkan RUU yang kita bahas hari ini

2026

Putusan 251

MK menyatakan UU Polri cacat formil; UU tetap berlaku

Respons DPR: merevisi UU P3

Mari pastikan RUU ini memperkuat putusan MK dan tidak mengesahkan praktik yang baru dinyatakan cacat.



Foto: Dokumentasi YLBHI

Pola ini punya nama: legalisme otokratis

Legalisme otokratis

Penguasa memakai prosedur hukum yang sah untuk melemahkan kontrol atas kekuasaan (Scheppele, 2018)

Bukti: Perppu menjawab koreksi MK atas Cipta Kerja

Kartelisasi partai

Koalisi gemuk membuat DPR berhenti mengawasi pemerintah (Ambardi, 2009)

Bukti: Baleg dan Menteri Hukum berdua menetapkan urgensi (Pasal 13 f)

Partisipasi bermakna sebagai hak

Warga berhak didengar, dipertimbangkan, dan dijawab (Putusan MK 91; Pasal 25 ICCPR)

Bukti: 1.676 DIM KUHAP tuntas dalam 2 hari

Draf menyerahkan “kunci percepatan” ke pengusul

Pasal 13 huruf f

Baleg dan Menteri Hukum cukup berdua menetapkan "keadaan tertentu"

Pasal 13 huruf c

"Perubahan terbatas" tidak punya ukuran; revisi UU KPK, MK, dan TNI pun berupa perubahan

Pasal 30 ayat (2) b

Tindak lanjut putusan MK meluas hingga pertimbangan hukum

Pasal 55 ayat (2) b

Pembahasan harus tuntas dalam satu masa sidang, tanpa jalan kembali ke prosedur biasa

Pasal 81 ayat (9)

Frasa "dapat menjelaskan" mengubah hak warga atas jawaban menjadi pilihan DPR

Tanpa sanksi

Draf tidak menetapkan akibat hukum ketika DPR melanggar tahapan dan partisipasi

**draf BKD 3 November 2026*

Desakan

1

Daftar yang jelas

Batasi jalur cepat pada daftar tertutup; hapus Pasal 13 huruf c dan f serta Pasal 35 ayat (1) huruf b

2

Wilayah terlindungi

Pertahankan materi HAM, pidana, keamanan, lembaga independen, pemilu, dan SDA di jalur biasa, juga pada 6 bulan akhir masa jabatan

3

Keputusan paripurna

Umumkan alasan dan materi percepatan sekurangnya 14 hari sebelum paripurna memutuskan

4

Wajib menjawab

Ganti "dapat" dengan "wajib" dan terbitkan matriks tanggapan atas setiap masukan

5

Terbuka setiap saat

Publikasikan draf, DIM, dan hasil Panja paling lambat 1x24 jam; buka setiap rapat

6

Konsekuensi jelas

Tetapkan pelanggaran tahapan sebagai cacat formil dan laporkan tindak lanjut putusan MK secara berkala